

# IMPLEMENTASI PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LOLU SELATAN KECAMATAN PALU TIMUR KOTA PALU

**Rachmad**

*mhad\_rachmad@yahoo.com*

*Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*This study aims to determine or find out how far implementation of Community Empowerment Program Policy Implementation in the Village of South Lolu District of South Palu Palu City. The method used in this research is a type of qualitative descriptive method. Determination of informants with purposive sampling technique type of data is primary data and secondary data, the technique of collecting data through observation/observation interviews/interviews, documentation and triangulasi Based on the research that the implementation of the Program for Community Empowerment in South Lolu village of Palu, has not been fully implemented properly and not in accordance with Palu Major Regulation Number 27 Year 2013 on Guidelines for the Implementation of the Regional Program for Community Empowerment if it is associated with the theory of Van meters and Van Horn that of 6 variables that influence a policy implementation is communication between the relevant parties (stakeholders) in implementation policy experience ineffectiveness and Resources financially inadequate, Disposition program implementers and Structure Bureaucracy implementing becoming more important in application of Palu City Mayor Regulation No. 27 of 2013, which in accordance with the procedures, strategies, principles and approach to the implementation of programs and activities.*

**Keywords:** *Implementation of Policy, Standards and targets, Communication, Resources, characteristic of the implementing agencies, social environment, economic, and political, Disposition / Attitude executor*

Kemiskinan merupakan suatu masalah fenomenal sepanjang sejarah Negara Indonesia sebagai suatu Negara kesatuan. Tidak ada persoalan yang lebih besar selain persoalan kemiskinan. Dengan persoalan kemiskinan ini yang telah menyebabkan jutaan anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat miskin, semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan karena lapangan pekerjaan semakin minim dan jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat, serta kurangnya jaminan sosial oleh pemerintah

terhadap perlindungan masyarakat miskin yang menyebabkan jutaan rakyat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan secara terbatas. Kemiskinan jika tidak segera ditanggulangi atau ditangani secara khusus bisa menjadi ancaman suatu bangsa sebagaimana telah dijelaskan dalam Deklarasi Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. “Bahwa kemiskinan adalah ancaman terhadap persatuan, kesatuan, dan martabat bangsa,

Pemerintah Kota Palu memiliki komitmen yang kuat dalam aspek penanggulangan kemiskinan khususnya dalam hal pengarusutamaan kebijakan (*mainstreaming of police*) penanggulangan

kemiskinan dengan sejumlah program yang berorientasi untuk percepatan pengurangan kesejahteraan warga. penduduk miskin Kota Palu berada pada kisaran angka 7,24 % dari jumlah penduduk sebanyak 256.037 jiwa pada tahun 2013.

Program daerah pemberdayaan masyarakat (PDPM) kota Palu yang dilaksanakan sejak tahun 2008, merupakan program yang dilaksanakan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Bila dicermati, program sangat strategis dalam rangka memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Dasar hukum Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) adalah Undang-undang Nomor 25 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN). Serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2005 tentang Kelurahan. Pola perencanaan pembangunan bukan hanya dari proses politik dan teknokratik namun juga melibatkan pelibatan masyarakat didalamnya. Hal inilah kiranya menjadi pijakan pemerintah kota palu meluncurkan program daerah pemberdayaan masyarakat (PDPM).

PDPM dirumuskan berdasarkan mekanisme yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap identifikasi suatu masalah, perencanaan, pelaksanaan, termasuk pemantauan dan evaluasi. PDPM dilakukan dengan pendekatan kepada masyarakat melalui proses pembangunan partisipatif (melibatkan seluruh komponen masyarakat), menumbuhkembangkan suatu kesadaran kritis serta kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk mampu diberdayakan sehingga mereka mampu menjadi subjek dari sebuah aksi pembangunan.

Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) sebagai Program Daerah yang mengedepankan pola pembangunan berbasis masyarakat yang melibatkan Kelompok Masyarakat Setempat (KMS) selaku subjek dan Objek pembangunan serta memperkuat partisipasi dan keswadayaan masyarakat. hingga “jumlah masyarakat dan pengangguran semakin menurun” masyarakat yang produktif dan bermartabat bukan berdasarkan rasa belas kasihan (*charity*), seyogyanya tidak menimbulkan beban hutang baru, namun harus bertumpu pada kemampuan internal dan partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja Pemerintah Kota Palu melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu dirumuskan berdasarkan mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran krisis dan kemandirian mereka bukan obyek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Zero Properti antara lain Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Padat Karya

Kelurahan Lolu Selatan sebagai pelaksana yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Palu untuk melaksanakan Program Daerah pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 1357 jiwa atau sebanyak 377 kepala keluarga dituntut senantiasa melaksanakan program daerah dengan baik yang sesuai dengan

aturan yang ada sehingga masyarakat miskin senantiasa dapat diberdayakan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat, melalui pembangunan prasarana dasar, pengembangan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan kapasitas

Problematisa Pemerintah Daerah dewasa ini yang sering terjadi dan di alami oleh Masyarakat Kota Palu khususnya di Kelurahan Lolu Selatan berdasarkan observasi awal yakni Penerapan Peraturan Walikota Palu Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu belum maksimal karena adanya beberapa aspek yang belum sesuai dengan Mekanisme prosedur yang telah ada.

Fokus permasalahan terkait Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Lolu Selatan Kota Palu. untuk membahas fokus permasalahan tersebut peneliti memilih menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn yaitu 1).Standar dan sasaran kebijakan, 2).Sumber Daya 3).Karakteristik organisasi pelaksana, 4).Sikap para pelaksana, 5).Komunikasi antar organisasi terkait, 6).Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dari ke 6 variabel diatas ada 3 variabel yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan PDPM antara lain : *Pertama: Komunikasi*, tidak berjalan dengan efektif karena masih kurangnya sosialisasi tentang PDPM sehingga masyarakat kurang mengetahui program tersebut *Kedua: sumber daya manusia dan sumber daya financial* yakni tidak memiliki kapasitas atau skill dalam mengimplementasikan kegiatan Program itu sendiri *Ketiga: Disposisi*, karakteristik agen pelaksana belum memiliki

sikap dan komitmen dalam pelaksanaan program PDPM

Kebijakan (*policy*) adalah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya manusia, finance dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara oleh Menurut Car J. Friedrich (dalam Solichin Abdul Wahab 2005:3) berpendapat bahwa:“Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan”

Sementara Amara Raksasataya (dalam Irfan Islamy 2009:17), mengemukakan bahwa “ kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) element yaitu:

- 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
- 2) Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Selanjutnya Thomas R Dye, adalah suatu upaya untuk mengetahui “*what governments do, why they do it, and what difference it makes*” apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah, kenapa mereka melakukannya, dan apa yang

menyebabkan capaian hasilnya berbeda-beda". (Thomas R. Dye, 1981) Jadi dalam pandangan Dye, bahwa analisa kebijakan pada akhirnya bermuara pada hal yang sama yaitu pendeskripsian dan penjelasan mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat dari tindakan/perbuatan pemerintah. Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan. Sebab itu segala sifat dan prosedur yang ada pada suatu keputusan melekat pula pada suatu kebijakan. Menurut Budiman (1997:89), kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan sebagai cerminan dasar perancangan penelitian dalam rangka mendapatkan data adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang ditetapkan peneliti adalah Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu. Kegiatan penelitian, dimulai dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015. Jumlah informan dalam penelitian ini 5 orang. Teknik penarikan informan menggunakan *Purposive*. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, Model interaktif dalam analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam Idrus (2009:147-151), yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan PDPM di Kelurahan Lolu Selatan memberi makna dan ruang lingkup kajian yang cukup kompleks, dari beberapa kajian tersebut terdapat

pendekatan-pendekatan yang efektif dan populer dikalangan masyarakat akademik berdasarkan konsep konsep Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam unsur yaitu : 1) Standar dan sasaran Kebijakan 2) Sumber daya 3) Komunikasi antar badan pelaksana 4) Karakteristik agen pelaksana. 5) Kondisi sosial Politik dan ekonomi 6) Sikap Pelaksana. Unsur ini sebagai aspek pengukuran implementasi kebijakan PDPM di Kelurahan Lolu Selatan .

Pembahasan berikut ini peneliti menguraikan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Ketua Satker PDPM, Lurah Lolu Selatan tokoh masyarakat, anggota BKM, dan Anggota KSM tentang implementasi kebijakan PDPM di Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur berdasarkan empat indikator yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

### Standar dan sasaran Kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja Pemerintah Kota Palu melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu dirumuskan berdasarkan mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan

dan evaluasi melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran krisis dan kemandirian mereka bukan obyek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Zero Properti Program Pemberdayaan Masyarakat. Sasaran program PDPM adalah terbangunnya lembaga pemberdayaan yang aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat, meningkatnya akses terhadap pelayanan kebutuhan dasar bagi warga miskin dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia dan pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Milenium Development Goals*).

Dari hasil penelitian, baik yang bersumber dari wawancara maupun hasil observasi dan studi dokumentasi, terbukti bahwa masyarakat telah memahami standar, tujuan dan sasaran kebijakan program PDPM penulis mengambil kesimpulan bahwa para perancang kebijakan, pelaksana kebijakan serta penerima kebijakan sudah memahami standar dan sasaran kebijakan serta maksud dan tujuan aturan tersebut hal ini dapat diukur tingkat keberhasilannya yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat melalui pembangunan prasarana dasar, pengembangan usaha-usaha produktif untuk peningkatan pendapatan, bantuan sosial, dan pengembangan kapasitas di Kota Palu sebagai tujuan program PDPM.

### **Aspek Sumber Daya**

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu memperhatikan sumber daya untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu kebijakan publik. Sumber daya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **Sumber daya manusia**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2011:100), bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (*human resources*) maupun dukungan sumber daya non-manusia (*non-human resources*)

Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat,

Dari penelitian peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh implementor PDPM, sehingga dalam implementasi kebijakan PDPM tidak terlaksana dengan baik, karena tidak didukung oleh skill atau kemampuan yang memadai

### **Sumber daya Financial (Dana)**

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran

yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan sangat dibutuhkan perpaduan sumber-sumber yang diperlukan, dalam artian bahwa disatu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak pada setiap tahapan proses implementasi perpaduan di antara sumber-umber tersebut harus benar-benar tersedia. Jadi tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan kebijakan adalah pelaksana kebijakan, dan umumnya harus dibekali dengan sejumlah kemampuan teknik administrasi tertentu. Sehingga hambatan yang akan terjadi dapat diantisipasi sebelumnya, dan tindakan yang cepat dan tepat dapat segera dilakukan. Oleh karena itu tanpa dukungan sumber daya yang memadai mustahil pelaksanaan kebijakan akan tercapai sesuai dengan keinginan organisasi

Dari keterangan informan terbukti bahwa anggaran untuk Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu masih kurang dari tiap-tiap kelurahan hanya memperoleh anggaran sebesar 120 juta itupun sudah termasuk dengan Biaya operasional kegiatan (BOP) tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari tim pendamping masyarakat (TPM), ketua kelompok masyarakat setempat, dan pelaksana kegiatan.

Dari hasil pemantauan peneliti di lapangan bahwa anggaran pelaksanaan program daerah pemberdayaan masyarakat masih minim sehingga pelaksanaan program kegiatan berjalan lamban atau kurang lancar.

### **Komunikasi antar badan pelaksana**

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan

komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat kecil. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Pada aspek komunikasi Program PDPM Kota Palu setiap perencanaan kegiatan diawali dengan pertemuan-pertemuan yang disebut dengan Libu ntodea pada tingkat kelurahan yang melibatkan unsur pengelola, pelaksana, dan penerima manfaat.

Berdasarkan hasil analisa peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi pelaksanaan program PDPM masih kurang dilakukan oleh implementor tingkat kegiatan terutama kepada masyarakat padahal sosialisasi itu perlu sebagai upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dan lembaga-lembaga pengelola kepada masyarakat sebagai kelompok pemanfaat langsung maupun kelompok masyarakat lainnya serta kepada pelaku dan instansi atau lembaga pendukung di tingkat Kota Palu. Oleh karena itu, aspek komunikasi antar *stakeholders* menjadi penting dalam mengefektifkan implementasi

kebijakan Peraturan Walikota Palu Nomor 27 Tahun 2013 terkait pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM). Aspek komunikasi inilah yang menjadi penting dalam rangka mensosialisasikan program tersebut sehingga pada gilirannya implementasi kebijakan Peraturan Walikota dapat efektif. Dalam rangka inilah masyarakat umum dapat memahami dengan baik, maka implementasi kebijakan tersebut terlaksana dengan efektif.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Dalam suatu implementasi kebijakan, agar dapat mencapai keberhasilan yang maksimal, maka harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat.

Karakteristik agen pelaksana dalam penelitian melihat pada kemampuan dan komitmen badan pelaksana dalam melaksanakan program/kebijakan yang sesuai dengan standar dan mekanisme yang berlaku, sehingga organisasi atau agen pelaksana dapat memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, baik secara individu maupun secara kelembagaan

Dari pernyataan informan, dapat disimpulkan bahwa komitmen para implementor belum memperlihatkan sikap yang tegas dalam melaksanakan program PDPM.

### **Kondisi sosial, politik, dan ekonomi**

Hal lain yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Dari beberapa Pernyataan dengan informan, memberikan pemahaman kepada kita bahwa program PDPM tidak berdasarkan pada kepentingan politik, tetapi lebih mengacuh kepada pemberdayaan masyarakat miskin, baik itu dari kelompok-kelompok kepentingan maupun dari kalangan elit politik. Dengan adanya dukungan dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan diharapkan akan mencapai tujuan yang diinginkan.

Peneliti berpendapat bahwa untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan maka harus didukung oleh iklim ekonomi, sosial dan politik yang kondusif. Kondisi ini juga turut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan program PDPM.

### **Sikap pelaksana**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (2010:104) bahwa disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, jika implementasi kebijakan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu ingin berhasil, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya

mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan dan kemauan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Demikian halnya dalam implementasi kebijakan program daerah pemberdayaan masyarakat (PDPM) sikap pro aktif dari para implementor sangat berperan terhadap cepat atau lambatnya kegiatan. Padahal dalam peraturan walikota palu nomor 27 tahun 2013 itu jelas mekanisme sasaran kebijakan.

Sikap seorang implementor dalam proses implementasi Kebijakan Publik dalam berbagai kegiatan dan program. Jika implementasi efektif maka para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya. Implementor menggunakan otoritasnya terhadap masalah yang kompleks yang cenderung sikap mereka mengacu pada kebijakan-kebijakan tersebut.

Disposisi sikap pelaksana dapat diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan PDPM berhasil secara efektif dan efisien, maka para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara transparan, jujur dan berkeadilan.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa disposisi sikap pelaksana sudah berjalan dengan baik hal ini didasarkan pada pernyataan informan dan didukung oleh fakta-fakta di lapangan. Menurut peneliti, selama ini bahwa proses pelaksanaan PDPM dalam hal disposisi sikap pelaksana sudah berjalan dengan baik

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan program PDPM dari hasil olahan wawancara dan pengamatan langsung dilapangan sesuai Teori Van Meter dan Van Horn yaitu komunikasi tidak berjalan dengan efektif karena masih kurangnya sosialisasi tentang PDPM sehingga masyarakat kurang mengetahui program tersebut, disamping itu tidak didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya financial yakni tidak memiliki kapasitas atau skill dalam mengimplementasikan kegiatan Program itu sendiri, karakteristik agen pelaksana belum memiliki sikap dan komitmen dalam pelaksanaan program PDPM namun demikian dalam implementasinya memberikan dampak yang positif/baik dalam menciptakan proses-proses tridaya dalam pembangunan masyarakat, seperti peningkatan sarana prasarana, perubahan pada bidang sosial dan ekonomi dilingkungan masyarakat melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM)

Demi berhasilnya Impelementasi kebijakan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kota Palu Khusus pada Kelurahan Lolu Selatan perlu sosialisasi yang konsistensi, kejelasan dan transmisi terhadap maksud dan tujuan PDPM ini karena dengan sosialisasi merupakan proses untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan. Perlunya penegasan diberlakukan Peraturan Walikota Palu Nomor 27 tahun 2013 secara konsisten dan bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas Sumber daya manusianya, terutama Tenaga Pendamping Masyarakat sampai

kepada masyarakat penerima manfaat. Peningkatan kualitas tersebut melalui bimbingan teknis, pelatihan dan peningkatan pendidikan formal yang mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini menjadi penting buat masukan bagi para pengambil kebijakan dan pengambil keputusan baik di lingkungan birokrasi maupun di tingkat legislatif. Perlunya dukungan SKPD teknis terkait agar dapat melakukan koordinasi (*cross check*) pada tataran Pemerintah Kelurahan diwilayahnya dalam pelaksanaan PDPM yang tepat sasaran pada implementasi kebijakan dari PDPM.

### Ucapan Terima Kasih

Saya menyadari dalam penulisan artikel ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti, akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari Dr. H. Nasir Mangngasing, M.Si selaku pembimbing I dan Nawawi Natsir, M.Si. selaku pembimbing II, akhirnya penulisan artikel ini dapat diselesaikan.

### DAFTAR RUJUKAN

- Dye, Thomas R, 1981, *Understanding Policy Analysis: An Introduction*, Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Idrus Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta. Erlangga.
- Indiahono Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dinamyc Policy Analysis*. Yogyakarta. Gava Media.
- Islamy, M. Irfan, 2003, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Miles, B Matthew and Huberman A, Michael., 1994. *Qualitative data*

*Analysis: An Expanded Sourcebook* (second Edition),SAG Publications. New Delhi

Peraturan Walikota Palu Nomor 27 Tahun 2013 *tentang* Pedoman Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan masyarakat (PDPM) Tahun 2013.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang* Pemerintah Daerah

Wahab, Solichin Abdul, 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta.

Widodo Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, Cetakan Pertama.